



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 14359-14369

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Hambatan Sosial Budaya dan Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo

Deddy Junaedi¹, Muftihatul Khaira², Jinani Firdausi³, Debby Mrdhatillah⁴

^{1,2,3,4}Program studi ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

deddyjuna87@gmail.com, muftihatulkhaira11@gmail.com, firdausijinani8@gmail.com, mardhatillahdebby@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat serta dinamika globalisasi yang terus berkembang. Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam, sektor pertanian, dan pariwisata yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan sosial budaya serta dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan sosial budaya, seperti pola pikir tradisional masyarakat, rendahnya tingkat literasi ekonomi dan pendidikan, serta budaya ketergantungan terhadap sektor tertentu, berimplikasi pada lambatnya transformasi struktur ekonomi daerah dan rendahnya daya saing masyarakat lokal. Di sisi lain, globalisasi memberikan peluang melalui keterbukaan pasar, perkembangan teknologi informasi, dan penguatan sektor pariwisata, namun juga menimbulkan berbagai tantangan berupa meningkatnya persaingan usaha, ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika globalisasi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Globalisasi, Kabupaten Probolinggo

1. Latar Belakang

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar penduduk. Selain itu, letak geografis yang strategis di kawasan pesisir serta kedekatan dengan destinasi wisata nasional, seperti kawasan Gunung Bromo, memberikan peluang pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah secara optimal.

Kondisi tersebut tercermin dari kontribusi sektor-sektor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo yang masih belum menunjukkan kinerja optimal apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023) mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo berada di bawah beberapa kabupaten lain di kawasan Tapal Kuda. Situasi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti struktur sektor unggulan dan produktivitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo adalah kuatnya nilai sosial budaya masyarakat agraris yang masih berorientasi pada pola ekonomi tradisional. Aktivitas produksi masyarakat pada umumnya masih bersifat subsisten, yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tanpa orientasi pengembangan usaha jangka panjang. Pola ini menyebabkan rendahnya nilai tambah ekonomi dan terbatasnya akumulasi modal. Menurut Suryana (2020), orientasi ekonomi yang tidak didukung oleh jiwa kewirausahaan dan inovasi akan menyulitkan daerah untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Hambatan Sosial Budaya dan Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo

Selain pola produksi tradisional, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterbatasan keterampilan kerja, serta minimnya pelatihan vokasi menyebabkan sebagian besar tenaga kerja belum siap menghadapi tuntutan ekonomi modern. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara profesional. Penelitian Darussalam et al. (2024) menegaskan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penghambat utama dalam adaptasi masyarakat terhadap perubahan ekonomi akibat globalisasi.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki modal sosial berupa nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat. Nilai ini pada dasarnya dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Namun, dalam praktiknya, modal sosial tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Gotong royong lebih banyak dimaknai sebagai bentuk kerja kolektif tradisional, bukan sebagai sarana pengembangan usaha bersama yang inovatif. Putnam (1993) menjelaskan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar penduduk. Selain itu, letak geografis yang strategis di kawasan pesisir serta kedekatan dengan destinasi wisata nasional, seperti kawasan Gunung Bromo, memberikan peluang pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pembangunan bahwa modal sosial akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan apabila mampu beradaptasi dengan perubahan dan mendorong kolaborasi yang produktif.

Dalam konteks globalisasi, Kabupaten Probolinggo menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Keterbukaan pasar dan perkembangan teknologi informasi menciptakan peluang bagi daerah untuk memperluas jaringan pemasaran produk lokal, baik melalui perdagangan antarwilayah maupun platform digital. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha lokal. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya pendampingan usaha menyebabkan UMKM lokal sulit bersaing dengan produk dari luar daerah yang lebih efisien dan inovatif (Darussalam et al., 2024).

Globalisasi juga mendorong perkembangan sektor pariwisata yang berorientasi pada pasar global. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, terutama di wilayah pesisir dan kawasan penyangga Gunung Bromo. Sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pengembangan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi. Febriani et al. (2024) menjelaskan bahwa tanpa pendekatan pemberdayaan masyarakat, pariwisata cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal lainnya hanya menjadi pekerja informal dengan pendapatan yang terbatas.

Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur semakin memperlihatkan posisi Kabupaten Probolinggo yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, investasi, dan integrasi ekonomi digital. Keterbatasan infrastruktur logistik dan akses pasar memperlambat distribusi produk lokal, sehingga menurunkan daya saing ekonomi daerah. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan usaha dan perluasan pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hambatan sosial budaya dan dinamika globalisasi. Interaksi antara nilai-nilai tradisional masyarakat dengan tuntutan ekonomi global menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis implikasi hambatan sosial budaya dan globalisasi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo, sehingga dapat dirumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hambatan sosial budaya dan dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat serta keterkaitannya dengan dinamika pembangunan daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan relevan, antara lain publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta artikel ilmiah dan literatur akademik yang membahas pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan globalisasi. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta implikasi hambatan sosial budaya dan globalisasi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kondisi sosial budaya masyarakat, dinamika globalisasi, dan kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan implikasi kebijakan dan rekomendasi strategis yang relevan bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

A. Hambatan Sosial Budaya terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo

Hambatan sosial dan budaya masih menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo, terutama karena masyarakat relatif masih terikat pada kebiasaan ekonomi tradisional, rendahnya tingkat pengetahuan ekonomi dan pendidikan, serta kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 berada pada angka 70,36, serta masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan pengangguran yang masih menjadi persoalan struktural. Data Badan Pusat Statistik dan berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya tersebut berkontribusi terhadap lambatnya peningkatan kinerja ekonomi daerah, meskipun Kabupaten Probolinggo memiliki potensi yang besar di sektor pertanian dan pariwisata. Ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah pulau kecil Probolinggo seperti Gili Ketapang memperburuk kondisi ini, di mana budaya lokal berbeda menyebabkan isolasi ekonomi dan rendahnya akses pasar.

1. Pola Pikir Tradisional Masyarakat

Banyak masyarakat Probolinggo, terutama di daerah pesisir dan komunitas Tengger, lebih suka cara kerja lama yang diwarisi dari orang tua, seperti bertani manual atau menangkap ikan dengan alat sederhana. Mereka ragu mencoba hal baru karena takut rugi, sehingga hasil panen atau tangkapan ikan tetap rendah dan bergantung pada musim. Data BPS menunjukkan sekitar 60 persen pekerja masih di sektor informal, yang membuat ekonomi sulit berkembang. (Potensi et al. 2024)

Kurangnya keterampilan digital dan akses modal membuat UMKM sulit berkembang, sementara urbanisasi pemuda menyebabkan kekurangan tenaga kerja di desa dan menurunnya kegiatan gotong royong tradisional; di masyarakat Tengger Desa Ngadisari, prioritas adat istiadat justru membatasi adopsi inovasi pertanian modern seperti bibit unggul, sehingga produktivitas tetap rendah. Selain itu, budaya tamping di komunitas Tengger memperkuat ketakutan terhadap risiko ekonomi baru, menghambat diversifikasi usaha di sekitar Bromo (Sukmawan, 2024).

Kebiasaan ini membuat UMKM hanya menyumbang 30-40 persen dari pendapatan daerah karena sulit dapat modal dan pelatihan, membuat harga hasil bumi seperti padi atau ikan yang naik-turun memengaruhi pendapatan sehari-hari, sementara kerja sama antarwarga lebih dipakai untuk bertahan hidup daripada membuka usaha baru. Misalnya, di Desa Ngadisari, warga Tengger lebih fokus pada upacara adat daripada menggunakan bibit unggul atau irigasi baru. Akhirnya, sektor perdagangan tidak berkembang, padahal ada peluang wisata di sekitar Gunung Bromo.

Tanpa perubahan cara berpikir, Probolinggo kalah saing dengan kabupaten lain seperti Malang yang lebih cepat beradaptasi dengan pasar. Cerita sukses dari warga lokal bisa membantu, tapi butuh dorongan agar mereka mau mencoba metode baru sambil tetap menjaga adat istiadat. Pendekatan sederhana seperti pelatihan langsung di desa akan lebih efektif untuk mendorong kemajuan.

2. Rendahnya Literasi Ekonomi dan Pendidikan

Pendidikan di Probolinggo masih rendah, dengan indeks pendidikan IPM hanya 0,55 pada 2021 dan lebih dari 15 ribu orang usia kerja cuma lulus SD atau kurang, menjadikan peringkat ketiga terburuk di Jawa Timur. Banyak anak putus sekolah karena orang tua merasa sekolah tidak menjamin pekerjaan bagus, apalagi pekerjaan utama masih di sawah atau laut. Data BPS 2024 memperlihatkan rata-rata lama sekolah yang pendek memengaruhi IPM secara keseluruhan.

Kurangnya pengetahuan ekonomi dasar, seperti cara hemat uang, meminjam modal bank, atau jualan online, membuat pelaku usaha kecil kesulitan berkembang dan lebih pilih pinjam dari rentenir. Skor literasi angka dan digital rendah, sehingga produk lokal seperti keripik atau madu sulit

dipasarkan lewat internet. Dampaknya, usaha kecil tidak bisa naik kelas dan kemiskinan terus berlanjut.

Di wilayah pesisir seperti Paiton, rendahnya literasi ekonomi menyebabkan ketergantungan pada sektor primer, dengan program pelatihan UMKM baru mencakup sebagian kecil pelaku usaha; hal ini mirip dengan ketimpangan di pulau kecil Probolinggo yang dipengaruhi budaya lokal (Azharhany et al., 2021). masalah ini membuat anak muda sulit naik derajat ekonomi, karena mereka mewarisi keterampilan yang kurang dari orang tua. Program literasi di komunitas seperti dari PSPK sudah mulai jalan, tapi masih terbatas. Pelajaran di sekolah yang gabungkan keterampilan keuangan bisa jadi solusi untuk masa depan yang lebih baik.

3. Budaya Ketergantungan dan Lemahnya Jiwa Kewirausahaan

Budaya ketergantungan terhadap bantuan eksternal masih menjadi salah satu hambatan sosial budaya yang memengaruhi pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Sebagian masyarakat cenderung menunggu intervensi pemerintah, seperti subsidi pupuk, bantuan sosial tunai, atau program bantuan usaha, daripada mengembangkan inisiatif ekonomi secara mandiri. Pola pikir jangka pendek yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hari ini turut memperlemah motivasi untuk membangun usaha berkelanjutan. Akibatnya, kewirausahaan belum berkembang sebagai pilihan utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut kontras dengan potensi ekonomi daerah yang sebenarnya cukup besar, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kawasan wisata Gunung Bromo, misalnya, membuka peluang pengembangan usaha lokal seperti homestay, jasa wisata, dan produk kerajinan. Namun, keterbatasan kepercayaan diri, minimnya keterampilan usaha, serta anggapan bahwa berwirausaha hanya dapat dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki modal dan pendidikan tinggi menyebabkan peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal.

Lemahnya jiwa kewirausahaan juga terlihat pada generasi muda, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Meskipun telah tersedia berbagai program dukungan dan pelatihan kewirausahaan, tingkat partisipasi siswa dalam program bisnis masih relatif rendah, yakni kurang dari 20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kewirausahaan belum menjadi aspirasi utama generasi muda, yang cenderung lebih memilih mencari pekerjaan formal atau bekerja di luar daerah. Kondisi tersebut mempersempit basis wirausaha lokal dan memperlambat regenerasi pelaku usaha di tingkat daerah.

Dalam konteks komunitas adat Tengger dan masyarakat pesisir, praktik gotong royong masih lebih difungsikan sebagai strategi bertahan hidup (survival strategy) daripada sebagai sarana membangun usaha kolektif yang produktif. Di wilayah pesisir, misalnya, aktivitas ekonomi masih didominasi oleh penjualan hasil tangkapan ikan mentah tanpa pengolahan bernilai tambah. Widodo (2010) menjelaskan bahwa pada wilayah pulau kecil seperti Gili Ketapang, perbedaan budaya dan keterbatasan akses memperkuat ketergantungan eksternal serta menghambat tumbuhnya kewirausahaan lokal.

Dampak dari budaya ketergantungan dan lemahnya kewirausahaan tercermin pada tingginya pengangguran muda dan dominasi pekerjaan berupah rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 tercatat sebesar 3 persen, dengan karakter pengangguran yang bersifat struktural, terutama di kalangan pemuda. Tanpa upaya sistematis untuk menanamkan nilai kemandirian ekonomi melalui pendidikan kewirausahaan di sekolah dan penguatan ekosistem usaha lokal, permasalahan pengangguran dan ketergantungan ekonomi berpotensi terus berlanjut dalam jangka panjang.

4. Ketimpangan Gender dalam Akses Ekonomi

Ketimpangan gender merupakan salah satu hambatan struktural yang masih memengaruhi pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Probolinggo. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari perluasan kesempatan ekonomi dan keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender. Ketika perempuan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, potensi pembangunan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di Kabupaten Probolinggo, perempuan memiliki tingkat partisipasi ekonomi yang cukup tinggi, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro dan rumah tangga. Namun, keterlibatan tersebut umumnya masih bersifat informal, berorientasi subsistensi, dan menghasilkan pendapatan yang relatif rendah. Perempuan sering ditempatkan pada posisi pendukung dalam aktivitas ekonomi keluarga, tanpa akses yang memadai terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaringan pemasaran. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam distribusi peluang ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Kabeer (1999), keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif dan pengambilan keputusan ekonomi menyebabkan rendahnya tingkat empowerment dan terhambatnya pemanfaatan potensi produktivitas perempuan. Di tingkat rumah tangga, ketimpangan ini berdampak pada lambatnya peningkatan pendapatan dan terbatasnya kapasitas keluarga untuk berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan anak. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko memperkuat kemiskinan antargenerasi dan memperlemah kualitas sumber daya manusia daerah.

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan. Bank Dunia (2020) menegaskan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, modal, dan kesempatan kerja produktif berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, ketimpangan gender dalam akses ekonomi di Kabupaten Probolinggo tidak hanya menjadi persoalan keadilan sosial, tetapi juga menjadi hambatan nyata bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Lemahnya Modal Sosial Produktif

Modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial pada dasarnya relatif kuat dalam masyarakat Kabupaten Probolinggo, terutama yang tercermin melalui praktik gotong royong dan solidaritas komunal. Modal sosial tersebut berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Putnam (1993), modal sosial baru memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi apabila diarahkan pada aktivitas produktif serta didukung oleh kelembagaan ekonomi yang efektif.

Di Kabupaten Probolinggo, fungsi modal sosial masih lebih dominan pada kegiatan sosial, adat, dan mekanisme saling membantu dalam situasi darurat, dibandingkan dengan pengembangan usaha kolektif yang berorientasi ekonomi. Praktik gotong royong jarang dimanfaatkan untuk membangun koperasi modern, klaster UMKM, atau jaringan produksi dan pemasaran bersama. Akibatnya, pelaku usaha kecil dan mikro cenderung beroperasi secara individual tanpa dukungan jaringan ekonomi yang kuat, sehingga memiliki daya tawar yang rendah dalam rantai pasok dan pemasaran.

Kondisi tersebut mendorong ketergantungan pelaku usaha kecil pada tengkulak atau perantara, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Ketergantungan ini menyebabkan harga jual produk primer relatif rendah dan nilai tambah yang dinikmati masyarakat produsen menjadi terbatas. Temuan Badan Pusat Statistik (2024) yang menunjukkan rendahnya nilai tambah sektor primer di wilayah pedesaan Probolinggo mengindikasikan bahwa kuatnya modal sosial belum berhasil ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.

Lemahnya pemanfaatan modal sosial secara produktif turut menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperlambat transformasi struktur ekonomi daerah. Tanpa penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi dan usaha bersama yang dikelola secara profesional, modal sosial yang ada berpotensi hanya berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup (*survival strategy*), bukan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Resistensi terhadap Perubahan akibat Faktor Budaya

Nilai budaya dan adat istiadat lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas, kohesi sosial, dan harmoni kehidupan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada komunitas adat seperti masyarakat Tengger. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi, nilai budaya tersebut juga dapat menjadi faktor penghambat ketika perubahan dan inovasi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah mapan. Menurut Rogers (2003) dalam teori Diffusion

of Innovations, resistensi terhadap inovasi umumnya muncul ketika suatu pembaruan dianggap tidak sejalan dengan nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat.

Di Kabupaten Probolinggo, resistensi terhadap perubahan tampak dalam keterbatasan penerimaan terhadap inovasi pertanian modern, pemanfaatan teknologi digital, serta pola usaha berbasis pasar. Pada komunitas Tengger, misalnya, praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya alam masih sangat dipengaruhi oleh nilai adat dan ritual tradisional, sehingga adopsi teknologi baru seperti penggunaan bibit unggul, mekanisasi pertanian, atau sistem pemasaran digital sering berlangsung lambat. Inovasi tersebut kerap dipandang berpotensi mengganggu keseimbangan alam dan tatanan budaya yang selama ini dijaga secara turun-temurun.

Resistensi budaya ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan lambatnya transformasi struktur ekonomi daerah. Program pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek budaya lokal cenderung mengalami keterbatasan efektivitas dan hanya menghasilkan dampak jangka pendek. Oleh karena itu, tanpa pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai budaya dan melibatkan tokoh adat serta komunitas lokal, upaya modernisasi ekonomi berisiko tidak berkelanjutan dan sulit diterima oleh masyarakat. Integrasi antara inovasi ekonomi dan kearifan lokal menjadi prasyarat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Minimnya Role Model Lokal dalam Kewirausahaan

Kurangnya Minimnya keberadaan role model kewirausahaan lokal menjadi salah satu hambatan penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Ketiadaan figur wirausaha yang berhasil dan dapat dijadikan teladan membuat masyarakat, khususnya generasi muda, sulit melihat kewirausahaan sebagai pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini memperkuat orientasi masyarakat pada pekerjaan tradisional atau sektor formal di luar daerah, serta mendorong kecenderungan migrasi tenaga kerja muda ke wilayah perkotaan.

Menurut Bandura (1986), proses *observational learning* berperan besar dalam membentuk perilaku ekonomi, di mana individu cenderung meniru pola tindakan yang terbukti berhasil dan relevan dengan lingkungannya. Di Probolinggo, keterbatasan wirausaha lokal yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi daerah seperti pertanian bernilai tambah, perikanan olahan, dan pariwisata lokal menghambat proses pembelajaran tersebut. Akibatnya, kewirausahaan belum terinternalisasi sebagai norma sosial maupun aspirasi ekonomi yang umum di tingkat komunitas.

Absennya role model kewirausahaan juga berdampak pada lemahnya regenerasi pelaku usaha di pedesaan. Banyak pemuda memilih meninggalkan desa karena tidak melihat contoh konkret keberhasilan usaha lokal yang berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat pengangguran struktural dan mempersempit basis ekonomi daerah, karena sektor-sektor lokal kehilangan tenaga kerja produktif dan inovatif. Dalam jangka panjang, minimnya figur teladan kewirausahaan berkontribusi pada stagnasi ekonomi lokal dan melemahkan keberlanjutan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

B. Dampak Globalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo

Globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi kegiatan ekonomi lintas wilayah yang ditandai dengan Globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi kegiatan ekonomi lintas wilayah dan negara yang ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, mobilitas tenaga kerja, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, globalisasi berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perubahan struktur produksi, pola konsumsi, serta daya saing ekonomi lokal. Kabupaten Probolinggo, yang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak terlepas dari pengaruh dinamika global tersebut.

Sebagai daerah dengan karakter ekonomi primer dan semi-tradisional, globalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang bersifat struktural. Keterbukaan pasar dan kemajuan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas akses pasar. Namun, pada saat yang sama, globalisasi juga membawa tekanan berupa persaingan usaha yang semakin ketat, potensi ketimpangan ekonomi antarpelaku usaha, serta risiko eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan demikian, dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan perlu dianalisis secara

komprehensif melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara ekonomi, globalisasi mendorong keterbukaan pasar daerah terhadap arus barang, jasa, dan modal dari luar wilayah. Kondisi ini memengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, di mana produk lokal tidak lagi hanya bersaing di pasar tradisional, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas, efisiensi, dan preferensi konsumen yang semakin beragam. Bagi pelaku usaha yang mampu beradaptasi, globalisasi membuka peluang peningkatan skala usaha dan akses pasar yang lebih luas. Namun, bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan cara produksi tradisional dan teknologi sederhana, keterbukaan pasar justru dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan usaha.

Dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo bersifat multidimensional dan tidak selalu simetris. Globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi lokal. Sebaliknya, tanpa kesiapan tersebut, globalisasi berpotensi memperdalam ketimpangan dan memperlambat transformasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, analisis dampak globalisasi perlu dibedakan antara dampak positif dan dampak negatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implikasinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

1. Dampak positif globalisasi

Dampak positif globalisasi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Globalisasi mendorong keterlibatan daerah dalam sistem perdagangan yang semakin terbuka, baik melalui perdagangan antarwilayah maupun integrasi dengan pasar yang lebih luas. Kondisi ini memberikan peluang bagi produk daerah untuk dipasarkan ke luar wilayah, bahkan hingga ke pasar nasional dan internasional. Peningkatan aktivitas perdagangan dan arus investasi yang menyertai proses globalisasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Darussalam et al., 2024).

Dalam konteks Kabupaten Probolinggo, keterbukaan pasar tersebut memberikan peluang signifikan bagi sektor unggulan daerah, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk berkembang. Produk lokal yang sebelumnya hanya beredar di pasar tradisional kini memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi digital dan platform pemasaran daring. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian daerah, terutama apabila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan selera pasar serta memenuhi standar kualitas yang lebih luas (Qibtiyah, 2024).

Globalisasi juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Akses terhadap teknologi dan informasi memungkinkan pelaku usaha mengadopsi inovasi dalam proses produksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan kinerja usaha ini berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku ekonomi lokal serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, globalisasi turut membuka peluang masuknya investasi ke daerah. Arus investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengembangan sektor ekonomi lokal melalui penyediaan modal, transfer pengetahuan dan keterampilan, serta penciptaan kesempatan kerja. Apabila dikelola secara efektif, investasi tersebut berpotensi memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Dampak Negatif Globalisasi

Di balik berbagai peluang yang ditawarkan, globalisasi juga membawa dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya persaingan usaha antara produk lokal dan produk dari luar daerah. Masuknya produk impor atau produk dari wilayah lain yang memiliki harga lebih murah dan kualitas kompetitif dapat menekan harga serta pangsa pasar produk lokal. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha yang belum siap menghadapi persaingan terbuka. Oleh karena itu, globalisasi dapat memperbesar ketimpangan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan dan perlindungan bagi pelaku usaha lokal (Putra & Astuty, 2023).

Selain persaingan usaha yang semakin ketat, globalisasi juga meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pasar eksternal. Kabupaten Probolinggo yang masih mengandalkan sektor primer, seperti pertanian dan komoditas berbasis sumber daya alam, rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Ketika harga komoditas internasional mengalami ketidakstabilan, kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keterhubungan dengan pasar global tidak selalu memberikan keuntungan yang stabil bagi daerah dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer.

Globalisasi juga berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan disparitas antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Pelaku usaha atau daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap modal, teknologi, dan informasi cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang globalisasi. Sebaliknya, pelaku usaha yang tertinggal akan semakin sulit bersaing. Apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada ekonomi lokal, globalisasi dapat memperbesar kesenjangan ekonomi dan memperlambat pemerataan pembangunan daerah (Setyadi, 2017).

Selain dampak ekonomi, globalisasi turut memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa didukung kebijakan lingkungan yang kuat berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Di daerah yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam, kondisi ini dapat mempercepat degradasi lingkungan dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

C. Implikasi Hambatan Sosial Budaya dan Globalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembangunan manusia serta karakter sosial budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perubahan struktur ekonomi, serta transformasi sosial yang mendukung produktivitas dan inovasi (Todaro & Smith, 2015). Kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya menjadi faktor penentu dalam kemampuan suatu daerah merespons perubahan ekonomi dan memanfaatkan peluang pembangunan. Oleh karena itu, hambatan sosial budaya dan dinamika globalisasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih berada pada kategori sedang. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo tercatat sebesar 70,36, meningkat sebesar 0,80 poin atau 1,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur yang telah berada pada kategori tinggi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo relatif lebih lambat dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat provinsi (BPS Kabupaten Probolinggo, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2023

Wilayah	2022	2023	Kategori IPM (2023)
Kabupaten Probolinggo	69,56	70,36	Sedang
Provinsi Jawa Timur	72,75	73,22	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur (diolah penulis)

Perbandingan IPM Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan IPM dari tahun 2022 ke 2023, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo masih tertinggal secara relatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi struktur ekonomi daerah secara optimal, sehingga kapasitas daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing masih terbatas.

Hambatan sosial budaya di Kabupaten Probolinggo tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga struktural. Rendahnya tingkat pendidikan formal, keterbatasan literasi ekonomi dan keuangan, serta dominasi pola pikir tradisional menyebabkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor ekonomi berproduktivitas rendah. Akibatnya, peningkatan IPM yang terjadi lebih banyak berdampak pada perbaikan kesejahteraan dasar, namun belum mampu mendorong perubahan struktur ekonomi secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan Suryahadi et al. (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan indikator pembangunan manusia tanpa disertai transformasi struktur ekonomi cenderung menghasilkan pertumbuhan yang lambat dan kurang inklusif.

Implikasi hambatan sosial budaya tersebut tercermin pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya mobilitas sosial masyarakat. Keterbatasan keterampilan kerja, rendahnya penguasaan teknologi, serta minimnya orientasi kewirausahaan menghambat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih relatif terbatas.

Di sisi lain, globalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Keterbukaan ekonomi, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya integrasi pasar antarwilayah seharusnya dapat menjadi pendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah. Stiglitz (2018) menegaskan bahwa globalisasi dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi apabila diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi yang memadai. Namun, di Kabupaten Probolinggo, manfaat globalisasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan kapasitas adaptasi terhadap teknologi dan inovasi menyebabkan terjadinya dualisme ekonomi di tingkat lokal. Sebagian kecil pelaku usaha yang memiliki akses terhadap modal dan informasi mampu terintegrasi dengan pasar modern dan memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih bertahan di sektor informal dan tradisional dengan produktivitas rendah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan dan memperkuat ketimpangan sosial ekonomi. Kuncoro dan Wahyuni (2023) menegaskan bahwa globalisasi tanpa penguatan kapasitas ekonomi lokal justru dapat memperdalam ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Interaksi antara hambatan sosial budaya dan arus globalisasi menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi konvensional. Ketika masyarakat masih dibatasi oleh pola pikir tradisional, rendahnya literasi ekonomi, serta resistensi terhadap inovasi, maka peluang globalisasi justru berisiko menciptakan eksklusi ekonomi. Globalisasi yang seharusnya membuka akses pasar dan teknologi dapat menjadi faktor pemicu ketimpangan apabila hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki kapasitas sumber daya dan akses yang lebih baik.

Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya peran kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan output dan investasi, tetapi juga pada proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Penguatan literasi ekonomi, digital, dan kewirausahaan menjadi elemen kunci agar masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan identitas sosial budayanya. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis, hambatan sosial budaya akan terus memperlambat pemanfaatan peluang globalisasi secara optimal.

Interaksi antara hambatan sosial budaya dan globalisasi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Globalisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat. Afidah dan Janah (2022) menekankan bahwa pembangunan daerah, khususnya wilayah pesisir, harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan agar tidak menimbulkan kerentanan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Zoya et al. (2024) menunjukkan bahwa penetrasi budaya global melalui perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran gaya hidup yang lebih konsumtif dan individualistis, yang berpotensi melemahkan modal sosial seperti gotong royong dan solidaritas komunitas. Melemahnya modal sosial tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor primer berproduktivitas rendah, minimnya inovasi lokal, serta terbatasnya pengembangan sektor ekonomi berbasis nilai tambah menjadikan

Kabupaten Probolinggo rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tekanan pasar global. Struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi menyebabkan pendapatan masyarakat sangat sensitif terhadap perubahan harga dan permintaan eksternal, khususnya pada komoditas pertanian dan perikanan. Kondisi ini membatasi kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat dan kelembagaan daerah, pembangunan ekonomi berisiko kehilangan ketahanan dalam menghadapi guncangan eksternal, termasuk krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim (Darussalam et al., 2024).

Dengan demikian, implikasi hambatan sosial budaya dan globalisasi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo tercermin pada belum optimalnya kualitas pembangunan manusia, lambatnya transformasi struktur ekonomi, terbatasnya inklusivitas pembangunan, serta rendahnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan literasi ekonomi dan digital, pembenahan kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan sosial budaya sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi tantangan globalisasi secara berkelanjutan dan inklusif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo masih menghadapi hambatan signifikan yang bersumber dari faktor sosial budaya dan dinamika globalisasi. Pola pikir ekonomi tradisional, rendahnya literasi pendidikan dan ekonomi, budaya ketergantungan, ketimpangan gender, lemahnya modal sosial produktif, resistensi terhadap perubahan, serta minimnya role model kewirausahaan lokal secara kolektif menghambat transformasi struktur ekonomi dan peningkatan produktivitas daerah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan UMKM belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, globalisasi menghadirkan peluang melalui keterbukaan pasar, perkembangan teknologi, dan arus investasi, namun juga menimbulkan tantangan berupa persaingan usaha yang ketat, ketergantungan pada sektor primer, ketimpangan ekonomi, serta tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, manfaat globalisasi cenderung tidak terdistribusi secara merata dan justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi nilai sosial budaya, dan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan global. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Referensi

1. Afidah, N., & Janah, F. R. (2022). Implikasi pembangunan berkelanjutan terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 115–128.
2. Azharghany, R., Ghufuron, S., & Fauzi, M. (2021). PKM Training for Rural Economic Empowerment (TREE) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Paiton Probolinggo. *Guyub: Journal of Community Engagement*, 2(3), 459–475.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2023). Indeks pembangunan manusia Kabupaten Probolinggo tahun 2023. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Jawa Timur menurut lapangan usaha.
5. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
6. Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
7. Darussalam, M. R., Ramadon, R., Arief, M. Z., & Pramasha, R. R. (2024). Dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan tantangan pelestarian lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education (IJEN)*, 2(1), 342–347.
8. Febriani, R., Lestari, S., & Wahyuni, D. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. *Jurnal Pariwisata dan Pembangunan Daerah*, 6(1), 55–68.
9. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
10. Kuncoro, M., & Wahyuni, S. (2023). Globalisasi dan ketimpangan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

Pembangunan, 24(2), 101–118.

11. Potensi, Berbasis, Lokal Di, Kota Probolinggo, Verto Septiandika, Imam Sucahyo, Andi Rahmadhi, Renny Chandra Dewi, and Mastina Maksin. 2024. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Kewirausahaan." 4(1): 67–75.
12. Putra, M. F., & Astuty, P. (n.d.). The impact of globalization on local economic development: Challenges and opportunities.
13. Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
14. Qibtiyah, D. B. (2024). Kurasi produk UMKM Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan daya saing di pasar ritel modern. GUYUB: Journal of Community Engagement, 5(3), 691–701.
15. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.
16. Setyadi, S. (n.d.). Dampak globalisasi terhadap ketimpangan wilayah: Studi di tujuh negara ASEAN [The impact of globalization on inequality: A case study of seven ASEAN countries].
17. Suryana. (2020). Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat, dan proses menuju sukses. Jakarta: Salemba Empat.
18. Sukmawan, S. (2024). *Harmonisasi Manusia dengan Alam dan Ekologi: Kajian atas Budaya Tamping di Masyarakat Tengger*. 14(2), 186–197.
19. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Boston: Pearson Education.
20. Widodo, H.T.(2010). *Ketimpangan pembangunan dan dampak sosial ekonomi masyarakat pulau kecil (Studi kasus pada pulau Gili Katapang Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.
21. World Bank. (2020). Women, business and the law 2020. Washington, DC: World Bank.
22. Zoya, R.A., Ramadan, R., & Noviarita, H. (2024). Dampak globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(12), xx-xx.